BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering terjadi di negara berkembang yang salah satunya adalah negara Indonesia. Kemiskinan memiliki sifat yang multidimensional yang berarti kemiskinan memiliki banyak aspek untuk dapat terjadi karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam.¹ Upaya pengentasan masalah kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari masalah yang lainnya yang bersifat eksplisit yakni pengangguran, pendidikan, kesehatan karena hal tersebut berkaitan erat dengan terjadinya kemiskinan.² Data kemiskinan di tempat penelitian penulis dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tabel Kemiskinan di Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Garis Kemiskinan-Perdesaan (rupiah/kapita/bulan) (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin-Perdesaan (ribu)	Presentase Penduduk Miskin-Perdesaan
1.	2019	305.491,00	163,95	10,42%
2.	2020	324.215,00	179,93	11,40%
3.	2021	335.990,00	184,49	11,64%
4.	2022	353.033,00	169,46	10,65%
5.	2023	385.874,00	171,18	10,72%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri.³

¹ Radlay Hasan Jan, Faradila Hasan, dan Budi Janis, “Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Mengatasi Kemiskinan”, *Journal of Economics and Accounting*, Vol. 3, No. 3, Maret 2023, hlm. 594.

² Kama Astrid Firdasari dan Susi Hardjati, “Analysis of Policy Implementation of the Food Program in Rural Areas”, *Journal La Sociale*, Vol. 05, Isu 05, 2024, hlm. 1390.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, “Angka Kemiskinan Kabupaten Kediri”, <https://kedirikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/angka-kemiskinan-kabupaten-kediri.html>, diakses pada 21 September 2024.

Pengentasan kemiskinan juga diupayakan oleh pemerintah dengan mengeluarkan beberapa program yang memiliki tujuan dan harapan untuk mengurangi terjadinya kemiskinan, salah satunya adalah merancang suatu program yang disebut dengan PNPM Mandiri. Kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kayen Kidul adalah program pengembangan serta pengelolaan dana mengalir atau bergulir yang memiliki manfaat untuk dapat memudahkan Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapat modal atau kredit dengan bentuk pinjaman kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Bentuk pinjaman yang diberikan adalah modal yang berupa uang tunai, Pasal 509 KUHPer menjelaskan bahwasannya pinjaman tersebut termasuk kedalam jenis benda bergerak yakni karena sifat kebendaan yang dapat berpindah ataupun dipindahkan. Pinjaman yang diberikan dianggap kebendaan bergerak karena sesuai atau telah diatur pada ketentuan undang-undang Pasal 511 Ayat (3), karena dalam proses pencairan modal terdapat perikatan atau perjanjian antara pihak kreditur dan debitur dengan begitu uang modal yang diberikan dapat ditagih. Pinjaman modal usaha yang diberikan merupakan uang dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimana masuk pada anggaran belanja daerah langsung karena berkaitan dengan dilaksanakannya suatu program dan kegiatan dari pemerintah daerah.

PNPM Kelompok SPP ini di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri pertama kali dimulai pada Tahun 2009 dan di kelola oleh Unit

Pengelola Kegiatan (UPK) yang bertempat di Jalan Diponegoro Nomor. 54, Tawangrejo Mukuh, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, yang mencakup beberapa desa yaitu Bangsongan, Desa Baye, Desa Jambu, Desa Kayen Kidul, Desa Mukuh, Desa Nanggung, Desa Padangan, Desa Sambirobyong, Desa Sekaran, Desa Semambung, Desa Senden, Desa Sukoharjo, dengan jumlah kelompok, jumlah anggota pemanfaat, serta jumlah dana perguliran SPP pada 3 (tiga) tahun terakhir, yang dapat dilihat pada tabel 2.⁴

Tabel 2. Data Jumlah Kelompok Pemanfaat Perguliran SPP

No.	Tahun	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Anggota Pemanfaat SPP	Jumlah Dana Perguliran SPP
1.	2019	255	867	Rp. 6449.200.000,00
2.	2020	234	718	Rp. 5.329.500.000,00
3.	2021	243	695	Rp. 5.049.600.000,00
4.	2022	223	670	Rp. 4.401.000.000,00
5.	2023	224	582	Rp. 3.854.500.000,00

Sumber : Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kayen Kidul Sehati Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Kabupaten Kediri. (2024).⁵

Perguliran dana SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri akan diserahkan apabila kelompok simpan pinjam telah membuat dan menyerahkan proposal kepada UPK serta seluruh anggota kelompok telah menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Bumdesma, karena perjanjian memberikan ikatan serta kepastian dari hukum bagi seluruh pihak yang ada

⁴ Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 27 September 2024.

⁵ Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 13 September 2024.

pada perjanjian tersebut, hal tersebut telah ada dan diatur pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer bahwasannya perjanjian merupakan suatu peraturan atau undang-undang yang sifatnya mengikat bagi semua orang atau pihak yang telah menyetujuinya, maka orang atau pihak tersebut berkewajiban untuk menaati dan melakukan atau melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disetujui. UPK kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri menyebut perjanjian pelunasan hutang SPP dengan nama Surat Perjanjian Kredit Nomor. 02/SPK/SPP/BUMDESMA-KYNKDLST/I/2024.⁶

Mudahnya proses serta persyaratan untuk mendapatkan pinjaman, maka munculah permasalahan yakni terjadinya kredit macet di setiap waktu tempo pembayarannya. Jaminan merupakan hal yang seharusnya penting dalam adanya suatu perjanjian, apabila suatu perjanjian di dalamnya tidak ada jaminan yang harus diserahkan maka akan memberikan sebab atas terjadinya kredit macet karena banyaknya pihak peminjam dana yang tidak memiliki rasa dirugikan dalam isi perjanjian yang di setujui tersebut tidak dibayar.⁷ Permasalahan kredit macet juga dialami UPK Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dengan data yang dapat dilihat pada tabel 3.

⁶ Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 27 September 2024.

⁷ Risma Yuniarti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Usaha Bersama Sitorajo Kari Kecamatan kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi", *JUHANPERAK*, Vol.2, No.2, Maret 2021, hlm. 551.

⁸ Wawancara, Sekretaris Unik Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 13 September 2024.

Tabel 3. Jumlah Kelompok Perguliran Dengan Kredit Pinjaman Macet

No.	Tahun	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Anggota Pemanfaat SPP	Jumlah Dana Perguliran SPP
1.	2019	21	32	Rp. 418.188.700,00
2.	2020	31	60	Rp. 229.614.300,00
3.	2021	50	85	Rp. 307.082.100,00
4.	2022	31	88	Rp. 114.135.000,00
5.	2023	35	60	Rp. 359.846.700,00

Sumber : BUMDESMA Kayen Kidul Sehati LKD Kabupaten Kediri. (2024).⁸

UPK di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugasnya telah menyelesaikan permasalahan kredit macet yang dimana data penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Kelompok Perguliran Dengan Pinjaman Macet Yang Terselesaikan

No.	Tahun	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Anggota Pemanfaat SPP	Jumlah Dana Perguliran SPP
1.	2019	10	20	Rp. 46.170.500,00
2.	2020	21	27	Rp. 101.522.500,00
3.	2021	25	25	Rp. 56.486.500,00
4.	2022	15	20	Rp. 35.349.700,00
5.	2023	14	14	Rp. 65.323.000,00

Sumber : BUMDESMA Kayen Kidul Sehati LKD Kabupaten Kediri. (2024).⁹

Alasan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai upaya penyelesaian sengketa kredit macet pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, karena melihat masih berjalannya Program tersebut walaupun sudah terjadi pelunjukan kredit macet yang membuat

⁹ Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 13 September 2024.

UPK kewalahan untuk menyikapinya, serta peneliti juga ingin mengetahui bagaimana upaya atau tindakan yang dilakukan oleh UPK untuk dapat menyikapi anggota kelompok pemanfaatan dana yang melakukan kredit macet dan juga apa yang dilakukan untuk dapat mencegah agar dapat mengurangi terjadinya kredit macet di pinjaman dana-dana yang akan datang.

Kredit macet termasuk dalam persoalan pada bidang hukum perdata, karena di dalamnya terdapat suatu perjanjian yang tidak terpenuhi, sehingga dapat dikatakan wanprestasi, oleh karena itu berdasarkan deskripsi yang telah ditulis oleh penulis di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai **“Penyelesaian Sengketa Kredit Macet pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis hubungan hukum para pihak pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan hukum dari para pihak pada pelaksanaan PNPM kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

2. Untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa kredit macet anggota PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai upaya penyelesaian sengketa kredit macet ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dan mampu untuk menjelaskan mengenai teori-teori yang memiliki kaitan dengan upaya penyelesaian sengketa kredit macet pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, serta memiliki manfaat untuk peneliti selanjutnya yakni sebagai referensi dan pembanding dalam pembahasannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulisan yang ditulis oleh penulis digunakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Studi Hukum Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur. Serta menambah wawasan atau pengetahuan mengenai upaya penyelesaian sengketa kredit macet pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

- b. Bagi Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang dimana dapat dijadikan sumber referensi lebih tepatnya untuk peneliti yang akan dilakukan setelahnya dengan lingkup khusus mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

c. Bagi Instansi

Penulis berharap hasil penelitian yang ditulis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan ataupun perbaikan pada upaya penyelesaian sengketa kredit macet PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan akan dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber tambahan oleh penulis dalam penyusunan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan, kesamaan, dan relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun 3 (tiga) penelitian yang digunakan antara lain:

Tabel 5. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.

No.	Judul Penelitian, Penulis, dan Tahun Terbit	Temuan Penelitian	Relevansi dan Perbedaan
1.	Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian kredit macet menggunakan 3 (tiga) mekanisme yakni di bulan pertama akan diberikan peringatan	Relevansi: Sama-sama membahas mengenai upaya penyelesaian sengketa kredit macet PNPM, penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian

	Kabupaten Aceh Barat Daya. Mahfuzah, Nila Trisna. 2023. ¹⁰	secara lisan, di bulan kedua akan diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, dan dibulan selanjutnya akan disita barang jaminan dengan jangka waktu dan besaran jumlah penunggakan hutang.	deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Perbedaan: Dalam rumusan masalah penelitian sebelumnya terdapat kendala upaya dalam penyelesaian kredit macet PNPM, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus pada upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi kredit macet dan kedudukan hukum kedua belah pihak pada PNPM. Lokus penelitian terdahulu di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan lokus penelitian saat ini di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.
2.	Penyelesaian Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PNPM Desa Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi). Zaimatun Umma. 2023. ¹¹	Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak PNPM di Desa Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk dapat mencapai kata	Relevansi: Sama-sama membahas penyelesaian sengketa kredit macet PNPM, penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.

¹⁰ Mahfuzah dan Nila Trisna, "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya", *Ilmu Hukum*, No. 2 Th. Oktober 2023, hlm 109.

¹¹ Zaimatun Umma, "Penyelesaian Kredit Macet Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PNPM Desa Mersam Kab. Batanghari Provinsi Jambi)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2023, hlm 64.

		mufakat, dan menggunakan beberapa mekanisme penyelesaian yang lain seperti melakukan teguran, apabila tidak mendapatkan itikad baik akan langsung di selesaikan dengan cara <i>rescheduling</i> atau memberikan tambahan waktu.	Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan prespektif hukum ekonomi syariah, lokus penelitian terdahulu di Desa Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sedangkan penelitian saat ini lokusnya di Kecamatan Kayen Kabupaten Kediri.
3.	Penyelesaian Kredit Macet di Badan Usaha Milik Desa Bersama Melalui Non Litigasi. Muhammad Sofi, Kukuh Sudarmanto. 2023. ¹²	Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya dalam praktik penyelesaian kredit macet melalui cara non litigasi di Bumdesma Sayung Mulyo adalah dengan cara melakukan penjadwalan ulang, restrukturisasi pinjaman, pengurangan kewajiban, kompensasi, dan aspek hukum atau litigasi khusus untuk penyalahgunaan dana.	Relevansi : Sama-sama membahas penyelesaian sengketa kredit macet PNPB, penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Perbedaan: Lokus pada penelitian terdahulu ada di Bumdesma Sayung Mulyo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sedangkan lokus penelitian saat ini di Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan jurnal tahun 2023.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Metode jenis penelitian empiris pada penelitian ini menggunakan metode dengan hasil dari pengumpulan data serta

¹² Muhammad Sofi *et al*, "Penyelesaian Kredit Macet di Badan Usaha Milik Desa Bersama Melalui Non Litigasi", Jurnal Juridisch, No. 3 th. November 2023, hlm. 231.

penemuan data melalui wawancara dan studi dokumen yang ada pada BUMDESMA tepatnya pada staff UPK di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dimana sebagai objek dalam pelaksanaan penelitian penulis, selain itu untuk memperkuat hasil dan penemuan data, penulis juga akan melengkapi dengan berbagai sumber buku serta jurnal yang ada.¹³

1.6.2 Bahan Hukum

Penelitian ini akan diperoleh melalui data diantaranya yakni data primer serta data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya tanpa menggunakan perantara, dengan kata lain menggunakan cara yaitu wawancara, dan studi dokumen, informasi penelitian dikumpulkan langsung dari para informan¹⁴, yakni staff UPK Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, dikarenakan informan tersebut mengetahui serta memahami secara penuh bagaimana hubungan hukum yakni dengan melihat perjanjian pelunasan hutang, dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa kredit macet pada PNPMM-Kelompok SPP.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dari sumber-sumber lain yang memiliki relevansi pada penelitian ini berupa daftar peraturan-peraturan, buku,

¹³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian, Cipta Media Nusantara*, Surabaya, 2021, hlm 10.

¹⁴ Deassy J.A. Hehanussa, *et al.*, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2023, Hlm. 186.

dan jurnal. Sumber data sekunder pada penelitian ini yang berupa peraturan-peraturan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum PNPM-Mandiri.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data oleh penulis dalam mendapatkan informasi adalah dengan menggunakan:

1. Wawancara

Wawancara terdiri dari sesi tanya jawab secara lisan. Peneliti dapat mewawancarai orang-orang untuk mengetahui kondisi mereka secara

langsung.¹⁵ wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah terstruktur, dengan menyajikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terstruktur, dengan menyajikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan berfungsi sebagai arahan untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk dapat menggali informasi atau menghimpun data yang dibutuhkan mengenai upaya penyelesaian sengketa kredit macet pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Informan dalam Penelitian yang akan dilakukan adalah staff BPH di Kantor UPK Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

2. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan dengan cara studi dokumen merupakan proses pengumpulan dari data yang diperlukan dengan cara melibatkan suatu penggunaan dari banyaknya dokumen baik rekaman, tertulis, ataupun materi lain yang diperlukan serta relevan dengan arah penelitian.¹⁶ Tujuan dari studi dokumen adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan peristiwa atau fenomena tertentu yang akan diteliti yaitu kredit macet PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan ini memiliki sifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan sifat deskriptif

¹⁵ Ibid., h.18

¹⁶ Ibid., h.20

kualitatif memiliki upaya untuk dapat memunculkan realitas sosial sebagai karakteristik, watak, ciri, gambaran sebuah kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Penelitian tersebut lebih berpotensi dan sesuai dengan keadaan yang sedang diteliti. Metode yang ada dalam penelitian ini adalah metode deskriptif serta menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana pada kondisi alamiah berfokus pada suatu data dan dokumen yang isinya searah atau relevan dengan penelitian yang diteliti. Peneliti juga akan berusaha dalam memahami informasi dari narasumber sehingga dapat memberikan rekomendasi solusi ataupun jawaban dari permasalahan kredit macet pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, penelitian yang akan dilakukan tersebut berlokasi di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Penetapan lokasi dipilih oleh penulis dengan pertimbangan yakni karena penulis tertarik untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa kredit macet pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri yang telah ada sejak tahun 2009.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai isu permasalahan yang diteliti oleh penulis. Bab pertama ini berisikan latar belakang penulisan dalam

menyusun penelitian serta dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika dalam penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terkait garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Bab *Kedua*, dalam bab ini membahas tentang rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai analisis yuridis hubungan hukum para pihak pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, yang dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab yakni landasan perjanjian pelunasan hutang SPK PNPM Kelompok SPP Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD dan pelaksanaan surat perjanjian kredit di Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD.

Bab *ketiga*, merupakan bab yang membahas tentang rumusan masalah kedua yakni tentang penyelesaian sengketa kredit macet pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yaitu penutup. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub yakni kesimpulan dan saran.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Penyelesaian Sengketa

1.7.1.1 Pengertian Sengketa

Faktor-faktor seperti adanya perbedaan dari suatu kepentingan atau permasalahan yang ada pada para pihak serta telah tercantum dalam perjanjian dan telah disetujui juga dapat menjadi alasan terjadinya suatu

sengketa,¹⁷ atau juga dapat terjadi karena adanya suatu peraturan yang bersifat kaku sehingga dianggap menjadi suatu halangan atau menghambat pihak untuk mencapai suatu tujuan individu para pihak.¹⁸

Teori yang sesuai dengan timbulnya suatu sengketa merupakan teori kebutuhan dan kepentingan dari manusia, karena dalam teori tersebut menjelaskan bahwasannya terjadinya suatu sengketa karena adanya suatu kebutuhan, kepentingan dari manusia yang tidak terpenuhi atau terhalang orang lain sehingga tidak dapat tercapai. Manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni substantif, prosedural dan psikologis. Kepentingan manusia dengan sifat substantif memiliki kaitan dengan kebendaan yakni seperti uang, sandang, papan dan kekayaan.¹⁹ Kepentingan yang berhubungan dengan peraturan yang ada di kehidupan bermasyarakat termasuk dalam kepentingan prosedural, sedangkan kepentingan yang terhubung dengan kebendaan atau non materiil yakni seperti sebuah empati atau penghargaan termasuk kedalam kepentingan psikologis.

Faktor internal terjadinya sengketa merupakan faktor yang ada dari sifat seseorang atau pihak tersebut, sedangkan faktor eksternal terjadinya sengketa ada dari adanya aturan yang telah dibuat dan diizinkan oleh kedua belah pihak maka aturan tersebut akan berlaku di setiap orang. Hal tersebut

¹⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 4.

¹⁸ Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011. hlm. 2.

¹⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. II, 2022. hlm 67.

sesuai dengan pendapat Owens, R.G, dan Schyut dengan telah menyatakan bahwasannya sebab terjadinya sengketa adalah sebagai berikut :²⁰

1. Owens, R.G: “Aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak tertulis dapat menyebabkan konflik jika penerapannya terlalu kaku dan keras”.
2. Menurut Schyut, sengketa adalah: “Suatu situasi yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan, yang satu dengan yang lain tidak dapat diserasikan dan mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan dari pihak lain”.

1.7.1.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang ada dapat dilakukan penyelesaian dengan 2 (dua) cara yaitu melalui cara litigasi atau non litigasi.²¹ Penyelesaian dari sengketa yang dilakukan diluar pengadilan terdiri atas beberapa cara yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi, arbitrase, serta konsiliasi diantara pihak yang telah dijelaskan pada Pasal 1 Angka (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Teori yang disampaikan oleh Laura Naderdan Harry F. Todd Jr menjelaskan bahwasannya sengketa dapat diselesaikan menggunakan 7 (tujuh) cara yakni:²²

²⁰ Jimmy Joses Sembiring, Op. Cit., hlm. 7.

²¹ Ibid, hlm. 9.

²² Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, dan Diana Susanti, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 16.

1. Membiarkan saja (*lumping it*), penyelesaian sengketa yang dilakukan ini oleh pihak yang memiliki rasa mendapatkan perilaku dirugikan, tidak adil, serta merasa tidak berhasil pada upaya tuntutan yang diajukan. Keputusan tersebut diambil karena untuk membiarkan saja sengketa yang menyebabkan timbulnya tuntutan dan pihak tersebut melanjutkan hubungannya bersama dengan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.
2. Mengelak (*avoidance*), berbeda dengan lumping it yang melanjutkan hubungan dengan pihak yang dirasa merugikan tersebut, avoidance merupakan tindakan dengan cara pihak yang telah dirasa dirugikan oleh pihak lain akan memilih untuk memutuskan hubungan dengan pihak tersebut.
3. Paksaan (*coercion*), merupakan tindakan dimana satu pihak memaksa menyelesaikan sengketa dengan pihak yang lainnya, sehingga tindakan ini memiliki kesan memaksa atau mengancam dengan melakukan suatu tindakan kekerasan, dengan begitu penyelesaian sengketa dianggap tidak diselesaikan dengan cara tenang atau damai.
4. Perundingan (*negotiation*), pengambil keputusan dalam sengketa yang sedang dialami adalah para pihak yang telah menyetujui perjanjian itu sendiri, dengan maksud penyelesaian sengketa akan dihadapi oleh pihak yang sedang bersangkutan saja, dan sepakat untuk tidak dilibatkannya pihak ketiga dalam hal tersebut.

5. Mediasi (*mediation*), untuk menyelesaikan sengketa yang ada memerlukan pihak ketiga untuk memutuskan kata sepakat para pihak. Pihak ketiga dapat dipilih oleh para pihak yang akan menyelesaikan sengketanya, atau juga dapat ditunjuk oleh pihak yang memiliki wewenang atas hal tersebut, dan para pihak harus menyetujui bahwasannya hasil dari pihak ketiga akan digunakan sebagai penyelesaian sengketanya.
6. Arbitrase (*arbitration*), yaitu penyelesaian sengketa dimana pihaknya telah saling setuju untuk minta bantuan pada pihak ketiga yang mana pihak tersebut disebut dengan arbitrator, dengan begitu para pihak juga telah sepakat akan menggunakan dan melaksanakan keputusan yang diberikan oleh arbitrator.
7. Peradilan (*adjudication*), yakni pihak ketiga yang telah diberikan kewenangan untuk dapat membantu dalam penyelesaian sengketa yang ada terlepas dari kemauan para pihak yang sedang mengalami sengketa. Pihak ketiga ini juga memiliki hak yang mana membuat suatu keputusan serta untuk dapat menegakkan keputusannya, yang mana memiliki arti bahwa pihak ketiga memiliki upaya dan keputusan yang diberikan tersebut wajib dilakukan atau dilaksanakan.

1.7.2 Kredit Macet

1.7.2.1 Pengertian Kredit Macet

Istilah kredit berasal dari Yunani yakni (*credere*) yang memiliki arti kepercayaan.²³ Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga.²⁴ Kredit menurut Thomas yakni rasa percaya atau rasa mampu yang dimiliki oleh debitur untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang dipinjam dan disepakati oleh pihak kreditur, sedangkan dapat dikatakan terjadi kredit macet apabila ada dalam suatu keadaan yang dimana proses pembiayaannya terjadi penyimpangan atau kesalahan atas *terms of landing* yang disepakati kedua belah pihak sebelumnya, oleh karena itu dapat terjadinya suatu keterlambatan dalam proses pemenuhan kewajibannya.²⁵

1.7.2.2 Syarat dan Unsur Kredit

Pada dasarnya kredit diberikan berdasarkan rasa percaya dari pihak kreditur ke debiturnya dan telah sesuai dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang mana telah disepakati oleh pihak debitur dan kreditur,

²³ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 3.

²⁴ Ibid., hlm. 57.

²⁵ Devita Arifiani, "Penanganan Kredit Macet Pada PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Mranggen", *Skripsi*, Universitas Semarang, 2022, hlm. 20.

menurut Ismail unsur-unsur yang ada dalam kredit terbagi menjadi 7 (tujuh) yakni:²⁶

1. Kreditor, yakni bisa berupa seseorang atau badan usaha seperti lembaga atau bank yang memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur.
2. Debitur, adalah pihak yang mencari atau memerlukan dana pinjaman, dapat disebut dengan peminjam yang diberikan pinjaman oleh kreditor.
3. Kepercayaan (*trust*), yakni kondisi dimana kreditor memberi rasa percaya kepada debitur, kreditor memiliki harapan bahwasannya debitur dapat memenuhi kewajiban dalam pembayaran angsuran pinjamannya sesuai jatuh tempo waktu yang telah disetujui bersama diawal perjanjian.
4. Perjanjian, merupakan kontrak yang mana telah disetujui oleh para pihak yang membuatnya yakni oleh pihak kreditor dan debitur.
5. Risiko, merupakan hal yang keberadaannya harus dihadapi oleh kreditor, hal tersebut terjadi karena dana yang telah diberikan ke debitur memiliki risiko untuk tidak kembali dengan begitu dapat dikatakan bahwasannya risiko merupakan suatu hal buruk yang memiliki kesempatan untuk terjadi atas proses penyaluran dana pinjaman kredit.

²⁶ Ana Afriana Amir, "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat", *Tesis*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020. Hlm. 17.

6. Jangka waktu, merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitor untuk dapat melakukan pelunasan pinjamannya ke kreditor.
7. Balas jasa, adalah imbalan atas dana yang telah disalurkan oleh kreditor, dengan kata lain debitor membayarkan sejumlah uang sesuai perjanjian yang telah disepakati para pihak. Imbalan atau balas jasa tersebut dalam bank konvensional disebut dengan bunga.

1.7.2.3 Jenis-Jenis Kredit

Faktor-faktor serta unsur kredit yang sudah ada dapat dibedakan dengan menggunakan jenis-jenis kredit menurut Kariyoto, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Kredit yang dinilai dari tujuannya, atau biasa disebut dengan kredit konsumtif. Dimana kredit ini memberikan tujuan yakni untuk dapat memudahkan jalannya suatu proses kebutuhan konsumtif karena uang pinjaman kredit akan habis digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Kredit yang dinilai dari jangka waktunya, yang mana kredit ini dibedakan menjadi beberapa yaitu kredit yang memiliki jangka waktu pelunasan pendek yakni maksimal selama 1 (satu) tahun dan juga kredit yang memiliki jangka waktu pelunasan menengah.
- c. Kredit yang dinilai dari penggunaannya, atau yang biasa disebut dengan kredit eksploitasi yang dimana kredit tersebut berjangka waktu pendek serta pihak yang memberikan adalah bank ke perusahaan dengan tujuan

²⁷ Sudarto dan Budi Santoso, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol 12, No 2, Maret 2020, hlm. 600.

pembiayaan modal kerja dari perusahaan peminjam tersebut, dengan begitu usahanya akan berjalan dengan lancar.

1.7.2.4 Faktor Penyebab Kredit Macet

Kredit macet dapat terjadi karena beberapa pengaruh baik pengaruh atau faktor yang ada dari diri debitur maupun kreditor, sedangkan faktor yang diakibatkan debitur yakni sebagai berikut:²⁸

1. Debitur menyalahgunakan kredit dalam penyalahgunaan tujuan pemakaian kredit. Karena pada dasarnya debitur harus bisa bertanggung jawab akan kepercayaan kredit yang diterima sesuai dengan tujuan awal pengajuan kredit.
2. Debitur kurang mampu untuk mengolah usahanya dengan baik, kredit yang telah diterima oleh debitur tidak dikelola dengan baik atau bahkan debitur tidak menggunakan dana pinjaman sebagai modal usaha, dengan kata lain debitur kurang profesional dalam pelaksanaan usahanya bisa karena kurangnya wawasan pada usaha yang akan dijalankan.
3. Debitur yang tidak bertanggung jawab, yang mana sebagian dari debitur memiliki unsur kesengajaan untuk tidak membayar kredit yang telah di dapatkannya.

Terjadinya kredit macet yang berkenaan dengan pihak kreditor yakni dapat dilihat dari cara analisisnya yang dilakukan dengan kurang seksama

²⁸ Eka Wahyu Hestya Budianto, "Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review", *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 3, Mei 2023. Hlm. 27.

atau teliti atau terburu-buru, dengan begitu hal-hal lain yang tidak dapat diprediksi terjadi sebelumnya atau salah pada perhitungannya, selain itu analisisnya yang dilakukan secara subjektif, hal tersebut terjadi karena akibat dari kolusi baik pihak yang melakukan analisis kredit dengan debitor.

1.7.2.5 Teknik Penyelamatan Kredit Macet

Kredit yang mengalami macet dapat diselamatkan dengan menggunakan cara yakni:²⁹

1. *Rescheduling*, merupakan teknik dengan cara mengganti atau melakukan penjadwalan ulang pembayaran seperti:
 - a. Memperpanjang tempo waktu pelunasan kredit, hal tersebut terjadi ketika debitor meminta untuk diberikannya dispensasi pada tempo waktu pelunasan hutang yang awalnya jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun, yang dimana memiliki tempo yang lama untuk melakukan proses pelunasan.
 - b. Memperpanjang tempo waktu angsuran, dalam hal ini memiliki kesamaan dengan memperpanjang waktu kredit, yang dimana seharusnya waktu angsuran hanya 30 (tiga puluh) kali menjadi 60 (enam puluh) kali. Yang dimana dalam hal ini jumlah angsuran yang harus dibayarkan akan menjadi lebih kecil dengan seiringnya ditambahnya waktu pelunasan kredit atau pinjaman.

²⁹ Komang Indra Apsaridewi, "Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank", *Kertha Wicaksana*, Vol. 17, No. 1, Februari 2023. Hlm. 62.

2. *Reconditioning*, penyelamatan dengan menggunakan cara dapat merubah berbagai persyaratannya yakni:
 - a. Kapasitas bunga, yaitu jumlah bunga dianggap menjadi hutang pokok.
 - b. Penundaan dalam pembayaran bunga sampai jatuh tempo tertentu, yakni hal yang ada dan dapat ditunda pembayaran hanya bunganya saja, untuk pinjaman pokoknya tetap dibayar sesuai dengan perjanjian awal.
 - c. Penurunan suku bunga, yakni digunakan untuk membuat ringan beban dari debitur, karena dalam proses penurunan suku bunga tersebut memberikan pengaruh terhadap jumlah dari angsuran dimana akan mengecilnya jumlah yang harus dibayarkan.
 - d. Pembebasan bunga, kreditor memberikan kepada debitur dengan menggunakan pertimbangan apakah debitur telah siap atau bisa untuk melunasi jumlah kreditnya, yang dimana debitur tetap wajib membayar dari pokok pinjaman yang dimiliki.
3. *Restructuring*, yakni suatu hal yang dimana dilakukan oleh kreditor kepada debiturnya dengan cara menambahkan modal dengan mempertimbangkan kebutuhan dari pihak debitur. Tindakan ini disebut juga sebagai tindakan dengan melakukan penambahan jumlah dari kredit dan menambahkan *equity*.
4. Kombinasi, adalah penggabungan ataupun kombinasi dari 3 (tiga) teknik penyelamatan kredit macet di atas.

5. Penyitaan Jaminan, hal tersebut dilakukan sebagai salah satu alternatif apabila debitur tidak memiliki itikad yang baik untuk membayar pelunasan dan benar-benar tidak bisa melunasi hutangnya.

1.7.3 Perjanjian

1.7.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian pada umumnya adalah tindakan atau perbuatan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana para pihak tersebut saling mengikatkan diri, hal tersebut telah dijelaskan dalam Buku III Pasal 1313 KUHPer. Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, adalah suatu hubungan hukum dimana dalam perbuatannya dilakukan antara dua belah pihak yang lahir dari kesepakatan dan dicapai untuk mendapatkan suatu hal yang telah disetujui bersama serta perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu sebab akibat hukum.³⁰

1.7.3.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Salam memiliki pendapat tentang macam asas utama dalam perjanjian terbagi menjadi 5 (lima), yakni:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak, Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer menjelaskan bahwasannya perjanjian yang telah dibuat secara sah tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi mereka yang membuat dan menyetujuinya. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bersifat bebas dan diberikan kepada para pihak yang mana memiliki hak

³⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, "*Hukum Perjanjian*", Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 3.

untuk dapat membuat atau tidaknya suatu perjanjian, dapat mengadakan perjanjian dengan siapapun dan kapanpun, dapat menentukan apa saja isi dari perjanjian atau pelaksanaannya serta persyaratan yang dibutuhkan, dan yang terakhir dapat menentukan bentuk tertulis atau lisannya perjanjian yang dilaksanakan.³¹

- b. Asas Konsensualisme, berlaku dengan memantapkan asas kebebasan berkontrak yang telah dijelaskan pada Pasal 1320 Ayat (1) KUHPer, karena dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak sepakat, maka perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dapat dibatalkan. Kata sepakat tidak boleh keluar karena adanya paksaan, karena sepakat yang diucapkan dengan adanya suatu paksaan dari pihak lain termasuk dalam *contradiction interminis*, sehingga dianggap tidak adanya kata sepakat apabila salah satu pihak sepakat dengan adanya paksaan.³²
- c. *Asas Pacta Sunt Servanda*, disebut sebagai asas kepastian hukum karena memiliki hubungan dengan sebab akibat dari dibuatnya suatu perjanjian. Asas ini merupakan asas yang dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi dari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak yang ada dalam perjanjian, karena pada dasarnya perjanjian bersifat mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak

³¹ Mahlil Adriaman dan Kartika Dewi Irianto, "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online dengan PT. Gojek Indonesia, *PAGARUYUANG Law Journal*, Vol. 4, No. 2, Januari 2021, hlm. 270.

³² Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 49.

sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer, maka tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap substansi dari perjanjian yang ada.³³

- d. Asas Itikad Baik, didasari oleh Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer. Asas ini menjelaskan bahwasannya pihak yang terikat dengan perjanjian harus dan wajib untuk melaksanakan isi yang ada berdasarkan dengan kepercayaan dan keyakinan serta kemauan baik dari kedua belah pihak yang telah menyetujui perjanjian tersebut.³⁴
- e. Asas Kepribadian, Pasal 1315 KUHPer menjelaskan bahwasannya perjanjian dapat timbul apabila seseorang tersebut mengadakan suatu perjanjiannya memiliki tujuan untuk pemenuhan kepentingan pribadinya, dengan begitu perjanjian tidak bisa timbul terkecuali dari adanya kepentingan pemenuhan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer juga menjelaskan asas kepribadian yang dimana menyatakan bahwasannya perjanjian hanya mengikat pihak yang membuat dan menyepakatinya.³⁵

1.7.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPer menjelaskan tentang apa saja syarat sah dibuatnya perjanjian, yakni:

1. Syarat Subjektif, dimana suatu syarat yang apabila diantara pihak melanggar atau bahkan tidak dapat memenuhi isi dari perjanjian maka

³³ Jabalnur *et al*, “Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2024, hlm. 248.

³⁴ Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 5, No. 2, Juni 2023, hlm. 112.

³⁵ *Ibid*,.

dapat dibatalkan dengan cara melalui pengajuan gugatan di pengadilan, yang mana meliputi sebagai berikut:³⁶

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sesuai dengan Pasal 1321 KUHPer yang dimana menjelaskan bahwasannya dalam proses pembuatan perjanjian para pihak yang ada harus menyatakan sepakat dengan semua hal-hal pokok yang dijanjikan tersebut dengan tidak adanya paksaan pihak manapun.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 KUHPer telah dijelaskan bahwasannya dalam pembuatan perjanjian, para pihak yang terlibat harus dikatakan cakap, dan terkecuali yang telah ditetapkan atau tercantum lain dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1330 KUHPer menjelaskan bahwasannya dapat dikatakan orang tersebut tidak cakap karena mereka belum dewasa, ada dibawah pengampuan, serta seorang perempuan dimana telah diatur dalam undang-undang, orang sakit jiwa, serta semua orang yang dilarang membuat perjanjian dan hal tersebut telah diatur dan dijelaskan dalam undang-undang.

2. Syarat objektif, yaitu syarat yang apabila terdapat pihak yang melanggar dan tidak memenuhi substansi dari perjanjian yang disepakati, oleh

³⁶ Bayu Sugara dan Moh. Taufik Hidayat, "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dikaitkan dengan Perjanjian *E-Commerce*", *Jurnal Sains Student Research*, Vol 1, No 2, Desember 2023, hlm.808.

sebab itu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum, syarat objektif tersebut yakni sebagai berikut:³⁷

a. Adanya suatu hal tertentu

Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPer telah mengatur mengenai syarat adanya suatu hal, yang mana objek dari suatu perjanjian yang disepakati tersebut adalah barang dimana jumlah serta jenisnya harus dapat ditentukan, selain itu barang yang diperjanjikan juga harus barang yang bernilai atau dapat diperjual belikan. Objek perjanjian juga harus jelas serta tidak samar, karena hal tersebut dilakukan agar dapat memberi jaminan serta kepastian dari hukum bagi yang telah menyepakatinya.

b. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1337 KUHPer mengatur tentang isi dari perjanjian dan dijelaskan bahwasannya isinya harus tidak bertentangan dengan, ketertiban umum dan kesusilaan yang ada dalam masyarakat, serta undang-undang yang ada. Perjanjian dimana isinya tidak memiliki suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

1.7.3.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi berikut:³⁸

³⁷ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerduta", *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2021, hlm. 179.

³⁸ Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, Humanities Genius, Makasar, 2022. Hlm. 41.

1. Perjanjian bernama merupakan suatu perjanjian yang memiliki nama sendiri, yang telah ada dan diatur oleh pembentuk dari undang-undang sendiri, yang dimana perjanjian bernama ada karena berdasar dengan tipe yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari dan terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUHPer.
2. Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang ada dan tidak diatur pada undang-undang atau KUHPerdata, akan tetapi banyak ditemui pada kehidupan bermasyarakat. Perjanjian tersebut lahir dengan didasari oleh asas kebebasan berkontrak.
3. Perjanjian timbal balik, merupakan perjanjian yang mana dapat menimbulkan suatu kewajiban pokok bagi pihak yang telah menyetujui substansinya.
4. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban, Merupakan suatu perjanjian yang hanya memberi suatu rasa untung bagi salah satu pihaknya, contohnya adalah hibah.

1.7.4 Wanprestasi

1.7.4.1 Pengertian Wanprestasi

Pasal 1234 KUHPer menjelaskan bahwasannya setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, dengan begitu dapat dikatakan sebagai prestasi apabila debitur memenuhi isi dari perjanjian. Secara umum wanprestasi dapat terjadi ketika

para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Pasal 1238 KUHPer menjelaskan bahwa debitor dapat dinyatakan berbuat lalai dengan surat perintah atau akta yang sejenis berdasarkan kekuatan dari perikatan yang telah dibuat, maka perikatan tersebut dapat mengakibatkan debitor dapat dianggap lalai dengan lewatnya tempo waktu yang telah disepakati. Pasal 1234 KUHPer juga memberikan keterangan bahwasannya penggantian biaya dilakukan apabila disebabkan adanya rugi serta bunga yang tidak terpenuhi dalam suatu perikatan apabila debitor yang telah dinyatakan berbuat lalai.

1.7.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Debitor dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi diantara bentuk-bentuk prestasi sebagai berikut:³⁹

1. Debitor sama sekali tidak berprestasi, dalam hal tersebut debitor memang tidak memiliki keinginan atau niat untuk memenuhi prestasinya atau dapat juga disebabkan karena debitor dilihat secara objektif tidak memungkinkan untuk melakukan prestasi atau dilihat secara subjektif sudah tidak berguna untuk melakukan prestasi.
2. Debitor keliru berprestasi, artinya debitor sudah melaksanakan atau memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, akan tetapi prestasi yang dilakukan tidak sesuai dengan kualitas yang ada dalam perjanjian.

³⁹ Rahim, *Op.Cit.*, h.83.

3. Debitur terlambat berprestasi, debitur dapat dikatakan telah melakukan prestasinya, objek dalam prestasi benar, akan tetapi waktu dalam melakukan prestasi tidak sesuai dengan perjanjian.

1.7.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Hukuman atau sanksi akan diberikan kepada debitur yang melakukan wanprestasi, yakni sebagai berikut:

1. Debitur memiliki kewajiban untuk dapat membayarkan ganti rugi yang dialami oleh kreditur, sesuai dengan Pasal 1243 KUHPer.
2. Kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan debitur melalui hakim, apabila perjanjian yang disepakati berupa perjanjian timbal balik, sesuai dengan Pasal 1266 KUHPer.
3. Risiko beralih kepada debitur sejak awal terjadinya wanprestasi, apabila perjanjian yang disepakati termasuk pada perjanjian untuk memberikan sesuatu, sesuai dengan Pasal 1237 Ayat (2) KUHPer.
4. Debitur memiliki kewajiban untuk dapat memenuhi perjanjian jika hal tersebut masih dapat dilakukan, atau melakukan pembatalan yang disertai dengan pembayaran ganti kerugian, sesuai dengan Pasal 1267 KUHPer.
5. Debitur memiliki kewajiban untuk membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di Pengadilan Negeri, apabila debitur dinyatakan bersalah.